

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016-2020

Hafida Roychana

*Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis,
Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
hafidaroychana25@gmail.com/ 085747285494*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Rasio yang digunakan ada lima yaitu kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dan pertumbuhan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan rasio, maka untuk tingkat kemandirian keuangan Tahun Anggaran 2016-2020 masih rendah, sehingga campur tangan dari pemerintah pusat masih tinggi. Pada tingkat ketergantungan keuangan daerah kontribusi dari pendapatan transfer terhadap pendapatan di Kabupaten Bantul masih tinggi di atas 70%. Namun, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah sudah sangat efektif dan tingkat efisien Pendapatan Asli Daerah sudah sangat efisien. Selanjutnya, untuk tingkat pertumbuhan pendapatan memiliki *trend* positif sebelum pandemi *covid-19*.

Kata kunci: Kemandirian, Ketergantungan, Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan

ABSTRACT

The goal of this study is to evaluate the Bantul Regency Government's level of financial independence for the fiscal years 2016–2020. Primary and secondary data sources are used in the descriptive qualitative methodology. Techniques for gathering data include interviews, observation, documentation, and literature reviews. Financial independence, financial reliance, effectiveness of regional original income, efficiency of regional original income, and revenue growth are the five ratios that are employed. The level of financial independence for the 2016–2020 Fiscal Year is still low, which means that influence from the federal government is still significant, according to the findings of the analysis utilizing ratios. The share of transfer income to income in Bantul Regency is still significant, at above 70%, at the level of regional financial dependency. However, both the effectiveness level and the efficiency level of regional original revenue are very high. Before the COVID-19 pandemic, the income growth rate was on the upswing.

Keywords: Independence, Reliance, Effectiveness, Efficiency, and Growth

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia”. Daerah otonom memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah karena setiap daerah mampu mengetahui segala permasalahan dan kebutuhan yang ada di daerahnya sendiri (Firdaus, 2020). Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan dan dapat mengalokasikan secara mandiri guna menetapkan prioritas pembangunan. Dalam melaksanakan otonomi daerah salah satu aspek penting yakni permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah (Albasiah, 2013).

Pengelolaan keuangan yang baik dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Selain membutuhkan sumber daya manusia yang handal, pengelolaan keuangan daerah juga memerlukan dukungan kemampuan keuangan yang memadai. Ukuran dari kemampuan keuangan daerah salah satunya yaitu dengan melihat besar kecilnya penerimaan daerah, terlebih khusus pada Pendapatan Asli Daerah. Penilaian dari akuntabilitas dan kemampuan

keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki kinerja keuangan baik dapat membiayai pelaksanaan dari otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011).

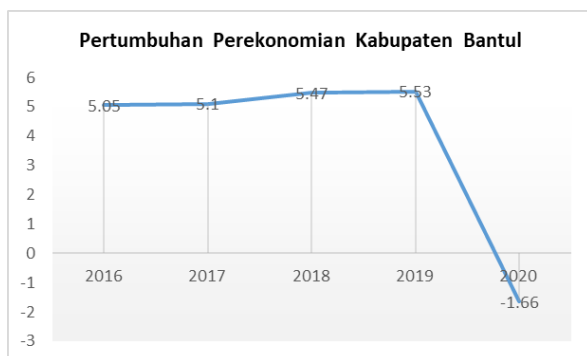
Salah satu daerah otonom yang ada di Indonesia adalah Kabupaten Bantul, sehingga selama menjalankan otonomi daerah kabupaten ini memiliki hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri termasuk pengelolaan keuangannya. Bagi pemerintah daerah adanya otonomi daerah ini dapat memberikan peran untuk menyediakan sarana prasarana publik sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terkait dengan akses faktor-faktor produksi serta modal. Bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Rante dkk (2017) mengemukakan bahwa APBD yang dialokasikan sebagai pengeluaran daerah, kemudian disalurkan pada sektor-sektor pembangunan akan berdampak pada pembangunan yang pesat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pembangunan dengan dukungan pemerintah daerah dan pengembangan kegiatan produksi di daerah akan memberikan efek terhadap peningkatan investasi masuk ke daerah, sehingga laju pertumbuhan

perekonomian daerah juga mengalami peningkatan. Proses kenaikan output perkapita dalam periode yang panjang ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi (Rauf dan Amiry, 2017).

Kinerja keuangan dari suatu pemerintah daerah merupakan gambaran tentang kondisi keuangan daerah sehingga baik dan buruknya keuangan mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap kinerja pemerintah tersebut. Apabila dilihat dari kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Bantul mengalami penurunan signifikan sebesar -1,66 dari tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 5,53 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul).

Berikut grafik dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020



Gambar 1. Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Gambar di atas menunjukkan tingkat fluktuasi dari perekonomian Kabupaten Bantul. Pada kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 terkait dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki realisasi PAD rata-rata sebesar di atas 100%. Namun, terdapat beberapa hal

yang perlu dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul seperti kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul yang masih rendah. Oleh karena itu, harapannya terdapat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bernilai tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak hanya dapat bergantung pada dana perimbangan berupa transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Bakar & Said, 2021).

Analisis

Menurut KKBI, analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan terhadap peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi utama dalam memberikan informasi kepada pihak terkait yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, serta politik. Namun, tidak semua pihak mampu memahaminya dengan baik sehingga diperlukan analisis laporan keuangan. Maksud dilakukan kegiatan analisis laporan keuangan ini untuk membantu pihak terkait dalam memahami laporan keuangan, penafsiran angka laporan keuangan, evaluasi laporan keuangan, dan penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Teknik yang digunakan untuk analisis laporan keuangan salah satunya yaitu analisis rasio keuangan. Hasil perhitungan rasio akan diinterpretasikan sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja keuangan instansi/organisasi dan kemudian dilakukan pengambilan keputusan (Kawatu, 2019:22-23).

Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam analisis terkait kemandirian keuangan daerah, penelitian ini menggunakan

5 (lima) macam rasio yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dan rasio pertumbuhan pendapatan. Berikut penjelasan dari masing-masing rasio yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Berikut kategori kemandirian keuangan daerah Albasiah, dikutip dari Halim (2002):

1. Instrukturif dengan persentase 0-25%. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
2. Konsultatif dengan persentase 25-50%. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Partisipatif dengan persentase 50-75%. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat pemerintah daerah tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Delekatif dengan persentase 75-100%. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kategori Efektivitas PAD

Kategori	Persentase (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2019)

d. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kategori Efisiensi PAD

Kategori	Persentase (%)
Sangat Efisien	< 10
Efektif	10-20
Cukup Efisien	21-30
Kurang Efisien	31-40
Tidak Efisien	> 40

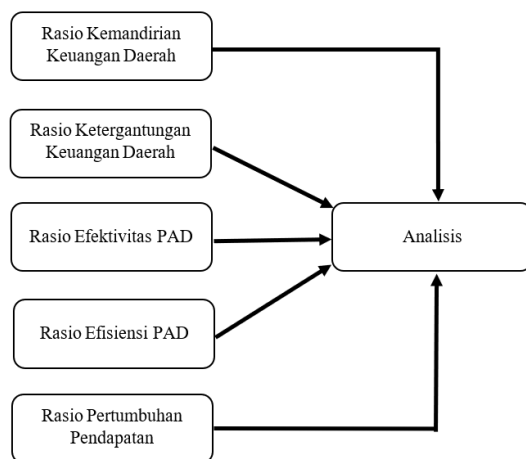
Sumber: Mahmudi (2019)

e. Rasio pertumbuhan pendapatan

$$\text{Pertumbuhan pendapatan th 1} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)}$$

Tujuan dilakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan adalah mengetahui tingkat kemandirian keuangan, tingkat ketergantungan keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dan pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020.

2. METODE PENELITIAN



Gambar 2. Desain Penelitian
 Sumber: diolah tahun 2022

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk mengungkapkan kejadian yang ada dan peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara

purposive dan *snowball*, teknik pengumpulan menggunakan gabungan, data yang dianalisis bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Anggito dan Setiawan, 2018).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder adalah

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu daerah otonom di Negara Indonesia. Objek penelitian yaitu terkait kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2016-2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3. Persentase Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Persentase Kemandirian Daerah (dengan penyebut pendapatan transfer)	Rata-rata Persentase Kemandirian Daerah (dengan penyebut pendapatan transfer)	Keterangan	Persentase Kemandirian Daerah (dengan penyebut pendapatan daerah)	Rata-rata Persentase Kemandirian Daerah (dengan penyebut pendapatan daerah)	Keterangan
2016	25.44%			20.22%		
2017	31.24%			23.68%		
2018	28.46%	29.25%	Konsultatif	20.77%	21.95%	Instruktif
2019	30.00%			22.29%		
2020	31.12%			22.79%		

Sumber: Keluaran Microsoft Excel (diolah tahun 2022)

Hasil perhitungan kemandirian Anggaran 2016-2020 untuk perbandingan keuangan daerah Kabupaten Bantul Tahun Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan

transfer berkisar antara 25,44% sampai 31,24% sehingga rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 29,25%. Persentase ini menunjukkan bahwa kategori untuk kemandirian keuangan yaitu konsultatif (berkisar antara 25%-50%) di mana pemerintah Kabupaten Bantul dianggap lebih sedikit mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan campur tangan pemerintah pusat sedikit lebih berkurang. Sedangkan untuk hasil perhitungan perbandingan dari Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu berkisar antara 20,22%-23,68% sehingga rata-rata dari kemandirian keuangan daerah sebesar 21,95%. Kategori untuk persentase ini adalah instruktif karena berkisar antara 0%-25% yang menunjukkan bahwa peran dari pemerintah pusat lebih dominan dan pemerintah daerah dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan maka untuk kemandirian keuangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dalam memberikan pendapatan transfer bagi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Kabupaten Bantul masih belum mandiri dalam mencukupi kebutuhan daerahnya. Hal ini ditunjukkan pada pendapatan transfer yang besar berupa bantuan dari pemerintah pusat dan daerah lainnya yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul memberikan kontribusi relatif kecil. Walaupun demikian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul juga mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 22,18% dan tahun 2019 sebesar 9,35%.

Rasio Ketergantungan Keuangan

Tabel 4. Persentase Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Persentase Ketergantungan Keuangan	Rata-Rata Persentase Ketergantungan Keuangan
2016	79.47%	
2017	75.81%	
2018	72.98%	75.16%
2019	74.30%	
2020	73.23%	

Sumber: Keluaran *Microsoft Excel* (diolah tahun 2022)

Dari tabel di atas hasil perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 dengan perbandingan pendapatan transfer dengan pendapatan daerah yaitu berkisar antara 72,98%-79,47% sehingga rata-rata ketergantungan keuangan daerah sebesar

75,16%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tinggi terhadap pendapatan transfernya yakni tiga per empat pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer. Komponen yang sangat berpengaruh terhadap tingginya ketergantungan pemerintah daerah

yaitu Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan ketergantungan dikarenakan terdapat kenaikan yang signifikan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah daerah

provinsi lainnya sebagai bantuan untuk padat karya, bantuan untuk jambanisasi, bantuan fasilitasi dan jejaring ekonomi bagi keluarga miskin dan RTSM PKH, dan bantuan pengadaan dan pemasangan APIL Listrik.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5. Persentase Efektivitas PAD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Persentase Efektivitas PAD	Rata-Rata Persentase Efektivitas PAD	Keterangan
2016	108.36%		
2017	107.89%		
2018	106.96%	109.10%	Sangat Efektif
2019	108.30%		
2020	113.98%		

Sumber: Keluaran *Microsoft Excel* (diolah tahun 2022)

Dari tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan efektivitas PAD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 yang berasal dari perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu berkisar dari 106,96% sampai dengan 113,98% sehingga diperoleh rata-ratanya sebesar 109,10%. Secara umum, hal ini dapat dikategorikan bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul sangat efektif karena realisasi dapat melebihi

target yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan nilai lebih dari 100%. Apabila dilihat pada tahun 2016 hingga 2018 terjadi penurunan tingkat efektivitas, namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan kembali efektivitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul bersungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangannya dan mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan baik dari tahun ke tahun karena nilainya di atas 100%.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6. Persentase Efisiensi PAD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Persentase Efisiensi PAD	Rata-Rata Persentase Efisiensi PAD	Keterangan
2016	1.56%		
2017	1.64%		
2018	2.32%	2.11%	Sangat Efisien
2019	2.70%		
2020	2.30%		

Sumber: Keluaran *Microsoft Excel* (diolah tahun 2022)

Dari tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 dengan perbandingan antara biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu berkisar antara 1,56% sampai dengan 2,70% sehingga rata-ratanya sebesar 2,11%. Oleh karena itu, kategori untuk tingkat efisiensi PAD di Kabupaten Bantul sangat efisien karena nilainya kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan

pemungutan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul memperhatikan biaya penggunaannya. Pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan tingkat efisiensi, sedangkan tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Penurunan tingkat efisiensi tahun 2020 juga diikuti oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. Penyebab utama adanya penurunan yaitu adanya pandemi *covid-19* sehingga biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah berkurang.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten

Tabel 7. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	% Pertumbuhan PAD	Rata-Rata % Pertumbuhan PAD	% Pertumbuhan Pendapatan Transfer	Rata-Rata % Pertumbuhan Pendapatan Transfer	% Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan	Rata-rata % Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan	% Pertumbuhan Pendapatan	% Pertumbuhan Pendapatan
2016	3.54%		2.21%		18.83%		2.52%	
2017	22.18%		-0.48%		72.37%		4.33%	
2018	-6.38%	4.70%	2.76%	-0.08%	1214.70%	253.97%	6.75%	1.64%
2019	9.35%		3.73%		-44.54%		1.88%	
2020	-5.20%		-8.60%		8.51%		-7.26%	

Sumber: Keluaran *Microsoft Excel* (diolah tahun 2022)

Dari hasil perhitungan tingkat pertumbuhan komponen dari pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah terlihat bahwa ketiganya mengalami fluktuasi. Pada pertumbuhan PAD berkisar antara -5,20% sampai dengan 22,18% sehingga rata-ratanya 4,70%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan disebabkan oleh peningkatan pada pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan mengenai alokasi pendapatan dari BOS.

Kemudian, pada pertumbuhan pendapatan transfer berkisar antara -8,60% sampai dengan 3,73%, sehingga mempunyai rata-rata sebesar -0,08%. Walaupun rata-rata menunjukkan negatif namun kontribusi dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, pertumbuhan lain-lain pendapatan memiliki nilai berkisar dari -44,54% sampai dengan 1.214,70% sehingga rata-ratanya sebesar 253,97%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi alokasi akun pendapatan BOS ke pendapatan hibah sehingga persentase kenaikan pada tahun 2018 sangat besar.

Secara keseluruhan pertumbuhan untuk pendapatan daerah berkisar antara -7,26% sampai dengan 6,75% sehingga rata-ratanya sebesar 1,64%. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya kondisi global yang melambat akibat dari pandemi *Covid-19*. Pemerintah Kabupaten Bantul memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menata ulang anggaran yang telah ditetapkan untuk keperluan aspek penanganan kesehatan, penanggulangan dampak ekonomi, dan penguatan jaring pengaman sosial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait analisis kemandirian daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020, maka kesimpulannya yaitu kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 mengalami fluktuasi. Apabila perhitungan menggunakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan transfer pusat, provinsi, dan pinjaman maka rata-ratanya sebesar 29,25% sehingga dikategorikan konsultatif. Namun, apabila perhitungan menggunakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total keseluruhan pendapatan daerah menghasilkan rata-rata sebesar 21,95% sehingga dikategorikan sebagai instruktif. Campur tangan dari pemerintah pusat masih sangat dominan sehingga tingkat kemandirian keuangan masih rendah.

Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 75,16%. Hal ini menunjukkan bahwa tiga per empat pendapatan daerah

berasal dari pendapatan transfer, sehingga tingkat ketergantungan Kabupaten Bantul masih tinggi. Sedangkan untuk tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar 109,10% sehingga dapat dikategorikan efektivitas PAD sangat efektif. Hal ini dikarenakan jumlah realisasi PAD lebih besar dari pada jumlah yang telah dianggarkan, maka nilai perbandingan antara realisasi dan anggaran mencapai lebih dari 100%. Kemudian, tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar 2,11% sehingga dikategorikan sangat efisien. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengalokasikan biaya pemerolehan PAD memberikan biaya insentif agar memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, pada tingkat pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mampu mengelola keuangannya dengan baik yang ditunjukkan *trend* positif pada tahun 2016-2018. Namun, tahun 2019 dan 2020 mengalami *trend* negatif yang disebabkan dampak dari pandemi *covid-19* sehingga berpengaruh kepada pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun saran yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul perlu mengoptimalkan dan menggali pendapatan yang diperoleh dari daerahnya sehingga potensi daerah dapat dikembangkan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memberikan sarana prasarana yang baik untuk mendukung optimalisasi dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan mengerakkan Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan banyak keuntungan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemkab Bantul, "Visi Misi Kabupaten Bantul," [Online]. Available: https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020030005/visi-misi.html. [Accessed 14 January 2022].
- [2] Pemkab Bantul, "Sekilas Kabupaten Bantul," [Online]. Available: https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html. [Accessed 19 January 2022].
- [3] Mahmudi, Analisis Laporan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019.
- [4] Pemkab Bantul, "Kondisi Geografis Kabupaten Bantul," [Online]. Available: https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html. [Accessed 19 January 2022].
- [5] Firdaus, "Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis," 2020.
- [6] BKAD, "Pejabat Struktural," [Online]. Available: <https://bkad.bantulkab.go.id/hal/pejabat-struktural>. [Accessed 26 January 2021].
- [7] KBBI, "Analisis," [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/analisis>. [Accessed 26 January 2022].
- [8] Permendagri, "Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah," [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019>.
- [9] Permendagri, "Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah," [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>.
- [10] Pemerintah Indonesia, "Undang-undang (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah," [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.
- [11] Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- [12] Pemerintah Indonesia, "Undang-undang (UU) tentang Keuangan Negara," [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.
- [13] Pemerintah Indonesia, "Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>.
- [14] Jogiyanto, Metodologi Penelitian Sistem Informasi : Pedoman dan Contoh Melakukan Penelitian di

- Bidang Sistem Teknologi Informasi, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- [15] Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009," [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/peraturan/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-0>.
- [16] D. Saputra, "Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Barat," 2014.
- [17] A. Bakar and S. W. Said, "Analisis Kemandirian, Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika," *Jurnal Kritis*, vol. V, 2021.
- [18] BPS, "Produk Domestik Regional Bruto," [Online]. Available: <https://bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>. [Accessed 14 March 2022].
- [19] BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha 2016-2020.
- [20] R. Primahadi and R. Kurniawan, *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman*, 2021.
- [21] D. A. Rauf and M. Amirya, "Pengaruh Belanja Modal dan Penyertaan Modal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Study Kasus di Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur)," 2017.
- [22] Pemkab Bantul, "Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul," [Online]. Available: <https://bkad.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/02/Peraturan%20Bupati%20Nomor%2078%20Tahun%202019.pdf>. [Accessed 14 10 2021].
- [23] F. S. Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, Sleman: Deepublish Publisher, 2019.
- [24] S. H. Situmorang and M. Lufti, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, 3 ed., Medan: USU Press, 2014.
- [25] A. Rante, M. S. Mire and A. Paminto, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah," vol. 13, 2017.
- [26] H. Sularso and Y. E. Restianto, "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah," vol. 1, 2011.
- [27] I. T. Ritonga, E. Suhartono and D. Purbaya, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- [28] A. Anggito and J. Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed., E. D. Lestari, Ed., Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- [29] Pemkab Bantul, "Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021," [Online].
- [30] Permendagri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan

- Keuangan Daerah," [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143371/permendagri-no-19-tahun-2020>.
- [31] BKAD, "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016," 2016.
- [32] BKAD, "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017," 2017.
- [33] BKAD, "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018," 2018.
- [34] BKAD, "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019," 2019.
- [35] BKAD, "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020," 2020.
- [36] O. A. Albasiah, "Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang," 2013.
- [37] I. G. N. S. Mahardika and L. G. S. Artini, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tabanan," 2014.
- [38] R. Imawan and A. Wahyudin, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012," *Accounting Analysis Journal*, 2014.
- [39] B. Siregar, Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua), Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- [40] M. D. Wardana, A. W. Mahsuni and A. , "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018," *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 2021.

BIODATA PENULIS

Nama : Hafida Roychana S.Tr.Ak
Program Studi : Akuntansi Sektor Publik
Departemen : Departemen Ekonomika dan Bisnis
Fakultas : Sekolah Vokasi
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro, Bulaksumur, Yogyakarta,
Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
55281
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 25 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Donoloyo RT.003 Tamanan Banguntapan Bantul DI
Yogyakarta 55191
No. Handphone/WhatsApp : 085747285494
E-mail : hafidaroychana25@gmail.com